

Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi

Agus Indriatno Kurniawan¹, Theresia Militina², Rahcmad Budi Suharto³

Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

¹Email: agus.indriatno.kurniawan@mhs.feb.unmul.ac.id

²Email: theresia.militina@feb.unmul.ac.id

³Email: rahcmad.budi.suharto@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Barat. Data yang digunakan adalah data Time Series, dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan bantuan program SPSS 24. Hasil analisis struktur pertama menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan investasi swasta dan tenaga kerja berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil analisis struktur kedua menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan investasi, pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh langsung investasi swasta, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada pengaruh tidak langsung investasi swasta, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Investasi swasta; pengeluaran pemerintah

Effect of Private Investment and Government Spending and Labor To Local Revenue and the Economic Growth

Abstract

This study was conducted in order to determine the effect of private investment and government spending and labor on local revenue and economic growth in West Kutai. The data used is the data time series, from 2004 to 2015. The analysis tool used is path analysis with SPSS 24. The results of the first structural analysis shows that government spending direct and significant impact on revenue, while investment and employment had no significant effect on revenue. The results of the second structural analysis showed that workers direct and significant impact on economic growth while investment, government expenditure and local revenue does not significantly influence economic growth. In this study it was found that the direct effect of private investment, government spending and employment to economic growth is greater than the indirect effect of private investment, government spending and employment to economic growth through revenue.

Keywords: Private investment; government spending

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Ernita, 2013). Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang, karena merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah.

Kuznets dalam Sukirno (1995), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian dari suatu periode ke periode selanjutnya.

Menurut Boediono (1992:45) pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Otonomi daerah yang telah diterapkan di Indonesia bertujuan untuk memberi kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya yang dapat membawa pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di setiap daerah (Nehen, 2010:282). Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, daerah diberikan hak untuk memperoleh sumber keuangan dan kepastian tersedianya pembiayaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan, seperti hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber- sumber daya nasional yang berada di daerah, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah (Bappeda, 2014:2). Kewenangan pemerintah daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat mendorong munculnya aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

Dalam membiayai pembangunan daerah, salah satu modal yang digunakan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). PAD yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Saragih (2003:55), daerah yang memiliki pertumbuhan PAD positif memiliki kemungkinan kenaikan pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan akses dari peningkatan PAD, jadi antara PAD dan pertumbuhan ekonomi diyakini terdapat adanya korelasi.

Salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat adalah investasi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sudah sangat pesat ternyata tidak terlepas dari pertumbuhan faktor utama proses investasi pembangunan, yaitu pembentukan modal. Dalam penelitian ini investasi yang dimaksud adalah investasi swasta. Menurut Pangestu (1996), antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif, dimana jika investasi tinggi maka pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat.

Kondisi perkembangan investasi swasta di Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat dari besarnya investasi penanaman modal di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2004 s/d 2015 rata-rata sebesar 1,3 triliun per tahun. Jika dilihat dari tahun ke tahun perkembangan investasi swasta di Kabupaten Kutai Barat mengalami fluktuasi yang sangat besar, bahkan pada tahun 2009, 2011 dan 2013 mengalami pertumbuhan investasi yang negatif.

Gambaran mengenai jumlah tenaga kerja di Kutai Barat ditunjukkan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja di Kutai Barat tahun 2004 s/d 2015 rata-rata sebesar 81,583. Hal ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di wilayah Kutai Barat. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian di Kutai Barat secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahun tetapi persentase pertumbuhannya mengalami perubahan yang berfluktuasi. Selanjutnya jika dikaitkan jumlah tenaga kerja dengan pendapatan asli daerah. terlihat bahwa perubahan jumlah tenaga

kerja berdampak terhadap pendapatan asli daerah yang dibuktikan bahwa pada tahun 2010 dan 2015 persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan pendapatan asli daerah sama-sama menurun dari tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa terjadinya peningkatan atau penurunan dari jumlah tenaga kerja yang diserap sektor perekonomian akan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat karena tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana dari pada pembangunan didaerah tersebut, sehingga dapat memajukan daerah.

Todaro (1997:18) menyebutkan pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan yang lebih menentukan didalam upaya pengelolaan perekonomian nasional atau daerah. Menurut Arsyad (1999:41) bahwa insfratuktur (social overhead capital) seperti jalan, jembatan dan pelabuhan walaupun tidak memberikan kontribusi secara langsung pada produksi output, tetapi infrastruktur memberikan peranan yang essensial dalam aktivitas ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan di daerah selanjutnya akan lebih memilih mengadopsi kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik potensi daerah itu sendiri, tentunya tuntutan pengenalan potensi daerah dapat dijadikan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan daerahnya.

Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarannya belanja rutin dan belanja pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2004 s/d 2015 dapat dilihat dari perkembangan pengeluaran pemerintah tahun 2004 s/d 2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15.10 % dari Rp. 575.65 Milyar pada tahun 2004 menjadi Rp. 2,663.95 triliun pada tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata pengeluaran pembangunan Kabupaten Kutai Barat yang digunakan untuk investasi guna mencapai sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka digunakan metode analisis jalur atau Path Analysis dengan persamaan sebagai berikut:

```
PYX1 + PYX2 + PYX3 + \varepsilon1....(1)
Y =
Z =
       PZX1 + PZX2 + PZX3 + PZY + \varepsilon 2....(2)
Di mana:
            adalah Investasi Swasta
   X1
   X2
            adalah Pengeluaran Pemerintah
   X3
            adalah Pengeluaran Pemerintah
   Y
            adalah Pendapatan Asli Daerah
   Z
            adalah Pertumbuhan Ekonomi
   P
            adalah Koefisien Jalur
            adalah Residu
```

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Program For Sosial Saince) for windows versi 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Investasi swasta berpengaruh langsung dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan hasil analisis variabel Investasi Swasta (X1) berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap PAD (Y) di Kabupaten Kutai Barat dengan koefisien β sebesar -0,211 dengan nilai sig. 0,399 > 0,05. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa investasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat.

Jika investasi naik sebesar 1 persen maka PAD akan mengalami penurunan sebesar 0,211. Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dalam Tambunan (2003:83) yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan Pendapatan suatu daerah, dapat dikatakan kurangnya

investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah.

Tidak signifikannya pengaruh investasi terhadap PAD dikarenakan investasi yang ada di Kabupaten Kutai Barat merupakan investasi padat modal terutama di sektor perkebunan, pertambangan dan penggalian serta sektor bangunan/konstruksi sehingga memberikan kontribusi yang sedikit terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat hal ini terjadi karena saat ini perekonomian belum dalam pengerjaan penuh (full employment) dan faktor-faktor produksi yang ada belum dimanfaatkan secara penuh. Selain itu kondisi ini dimungkinkan terjadi karena nilai investasi yang masuk cukup fluktuatif di Kabupaten Kutai Barat sehingga belum memberikan dampak nyata secara langsung pada PAD. Kurangnya investasi di dalam sarana produksi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil studi Sodik (2007) bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap PAD dengan arah yang negatif dan relevan dengan hasil penelitian Rion (2013) bahwa investasi PMDN dan PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Kalimantan Timur.

2. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat.

Pada penelitian ini variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki Koefisien jalur sebesar 1,068 mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dapat diiterpretasikan bahwa setiap kenaikan Pengeluaran Pemerintah sebesar satu persen akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,068 persen. Belanja pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2005 – 2012 secara kuantitas mengalami peningkatan namun persentase peningkatannya cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Jika belanja pembangunan dikaitkan dengan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah maka masalah yang terlihat yaitu pada tahun 2015 terjadi penurunan dari belanja pembangunan dan begitu juga dengan pendapatan asli daerah dan perekonomian Kutai Barat.

Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat Halim (2001:99) yang menyatakan bahwa dalam penciptaan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja pembangunan yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah agar pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh pendapat Abimanyu (2005:40) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang meningkat dan bertambahnya investor sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pahala Bellarminus (2015) yang menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

3. Tenaga Kerja berpengaruh langsung dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat

Tenaga Kerja memiliki Koefisien jalur sebesar 0,116 mempengaruhi secara positif terhadap pendapatan asli daerah, dapat diiterpretasikan setiap kenaikan Tenaga Kerja sebesar satu persen akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,116 persen. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian di Kutai Barat secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahun tetapi persentase pertumbuhannya mengalami perubahan yang berfluktuasi. Selanjutnya jika dikaitkan jumlah tenaga kerja dengan pendapatan asli daerah terlihat bahwa perubahan jumlah tenaga kerja berdampak terhadap pendapatan asli daerah yang dibuktikan bahwa pada tahun 2009 persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan pendapatan asli daerah sama-sama menurun dari tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa terjadinya peningkatan atau penurunan dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh

sektor perekonomian akan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kutai Barat karena tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana dari pada pembangunan di daerah tersebut, sehingga dapat memajukan daerah.

Sumber daya manusia yang dilengkapi dengan ketrampilan dan sikap mental terhadap pekerjaan, serta kemampuan untuk berusaha sendiri merupakan modal utama bagi terciptanya pembangunan. Tenaga kerja dalam pembangunan mutlak diperlukan, karena merekalah yang akan melaksanakan pembangunan ekonomi tersebut. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

Samuelson dan Nordhaus (2001:54) menyebutkan bahwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam perekonomian. Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf, kesehatan dan isiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Mardiasmo (2002:84) yang menyatakan tenaga kerja yang diserap oleh sector perekonomian pada suatu daerah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Apabila sektor perekonomian yang ada pada daerah mampu menyerapkan tenaga kerja yang tersedia tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Halim (2001:98) menyatakan bahwa pajak penghasilan yang diperoleh dari tenaga kerja merupakan sumber penerimaan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedy Rustiono (2008) yang menunjukkan bahwa tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

4. Investasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonmi di Kabupaten Kutai Barat

Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat. Koefisien dari variabel investasi adalah sebesar 0,080 dan nilai tersebut adalah positif maka peningkatan realisasi investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kutai Barat Barat. Jika realisasi investasi naik 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi Kutai Barat naik 0,080 persen. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak birokrat Kutai Barat, untuk mengoptimalkan peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam negeri (PMDN).

Temuan penelitian ini juga membuktikan bahwa secara parsial investasi swasta berpengaruh positif terhadap perekonomian. Apabila investasi swasta di Kabupaten Kutai Barat mengalami peningkatan secara positif setiap tahunnya maka perekonomian daerah Kabupaten Kutai Barat juga akan mengalami peningkatan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adrian Sutawijaya (2007) yang menyatakan bahwa investasi swasta dan investasi pemerintah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Temuan penelitian ini relevan dengan pendapat Jhingan (1999:291) yang memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam kegiatan perekonomian suatu daerah khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan dan kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal sehingga akan memperbaiki kondisi perekonomian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa temuan penelitian ini membuktikan bahwa apabila pemerintah daerah Kutai Barat dapat meningkatkan total investasi swasta setiap tahunnya tentu akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian daerah KabupatenKutai Barat.

5. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonmi di kabupaten Kutai Barat

Variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki Koefisien jalur sebesar 0,363 berhubungan dan mempengaruhi secara positif, dapat diiterpretasikan setiap kenaikan Pengeluaran pemerintah sebesar satu persen akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 0,363 persen. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Pengeluaran pemerintah merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah lebih berkaitan erat dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dimana secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan- pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamzani Sodik (2007) tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional, menekankan pengaruh pengeluaran pemerintah baik belanja barang maupun investasi pemerintah, yang disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Manuaba, B.P. (2006) yang mengatakan terdapat hubungan positif dan antara pengeluaran pemerintah dengan Pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini relevan dengan pendapat Saragih (2003:115) yang menyatakan bahwa jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak perekonomian daerah menjadi lebih baik. Dengan demikian dapat diketahui apabila pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan setiap tahunnya tentu akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perbaikan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Kutai Barat.

6. Tenaga Kerja berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonmi di Kabupaten Kutai Barat

Tenaga kerja berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruhnya sebesar 0,984 persen, dapat diiterpretasikan setiap kenaikan Tenaga kerja sebesar satu persen akan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sebesar 0,984 persen.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Soebagiyo (2007) yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu factor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak jumlah tenaga kerja berarti tingkat produksi juga akan meningkat.

Penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Todaro (2000:15) yang menyatakan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga Kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor fositif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Barat

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruhnya hanya 0,239, dapat diiterpretasikan setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar satu persen akan meningkatkankan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,239 persen.

Pengaruh yang kecil tersebut disebabkan karena pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kabupaten Kutai Barat habis dipergunakan untuk menutupi biaya-biaya rutin untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sehingga menyebabkan pendapatan asli daerah tersebut belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap kondisi perekonomian daerah.

Temuan penelitian sesuai dengan pendapat Kuncoro (2004:64) yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah akan memperbaiki kondisi perekonomian yang diukur dari PDRB atas dasar harga konstan, sehingga peningkatan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan memberikan kontribusi positif terhadap pembanguan perekonomian. Dengan deimikian dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian akan dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah.

Penelitian ini juga konsisten dengan pendapat Tambunan (2006:67) yang menyatakan jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan memiliki kesempatan yang tinggi untuk membangun perekonomiannya.

8. Investasi berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui PAD di Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan hasil analisis, investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah. Pengaruh langsung yang diberikan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,080. Sedangkan Pengaruh tidak langsungnya investasi melalui pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar =0.050.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,080 dan pengaruh tidak langsung sebesar -0.050 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung., dapat diiterpretasikan setiap kenaikan investasi melalui pendapatan asli daerah sebesar satu persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,050 persen. Ini berarti investasi memberikan pengaruh sebesar -0,050 persen terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat Jhingan (1999:291) yang memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam kegiatan perekonomian suatu daerah khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan dan kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal sehingga akan memperbaiki kondisi perekonomian. Penelitian ini juga tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan Jolianis (2012) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

9. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui PAD di Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan hasil analisis, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah. Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah melalui pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,255. Dapat diterpretasikan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah melalui pendapatan asli daerah sebesar satu persen akan meningkatkankan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,255 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,363 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,255 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung, artinya bahwa pendapatan asli daerah memperlemah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dedy Rustiono (2008) yang menyatakan adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga sejalan dengan pendapatan Sandono Sukirno (2000) yang menyatakan Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah bagian dari kebijakan fisikal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fisikal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat.

10. Tenaga Kerja berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui PDRB di Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan hasil analisis, tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah. Pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,028

persen. Dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan tenaga kerja melalui pendapatan asli daerah sebesar satu persen akan meningkatkankan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,028 persen.

Penelitian ini sejalan dengan pendapat Payaman J. Simanjuntak (2002) yang menyatakan Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Hasil penelitian ini sesuaai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sofia Arlani (2012) tenaga kerja berpengaruh positif perhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga sejalan dengan teori artur okun, yang dikenal dengan hukum Okun yang menyatakan tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan pertumbuhan output (GNP), artinya bila laju pertumbuhan ekonomi yang naik maka meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja atau mengurangi pengangguran sebaliknya jika laju pertumbuhan ekonomi yang rendah atau negatif akan diikuti tingkat pengangguran yang meningkat.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,984 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,028 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung, artinya bahwa pendapatan asli daerah memperlemah pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1. Investasi berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap Pendapataan Asli daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat.
- 2. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat.
- 3. Tenaga Kerja berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Kutai Barat
- 4. Investasi berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Kutai Barat.
- 5. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Barat.
- 6. Tenaga Kerja berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Barat.
- 7. PAD berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Barat.
- 8. Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui PAD di Kabupaten Kutai Barat. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui PAD di Kabupaten Kutai Barat.
- 9. Tenaga Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui PAD di Kabupaten Kutai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah Nur Nunuy. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Implementasi Keuangan Daerah. Kencana. Jakarta

Arsyad, Lincolyn. 1997, Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga, Penerbit BP STIE YPKN. Yogyakarta.

Arsyad,Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta

Arndt, H. W., 1998, Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru, P3ES, Jakarta.

Bawono, Bernanda Gatot Tri. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten). Tesis. UII. Yogyakarta.

- Blakely. J Edward. 1994. Planning Lokal Ekonomic Depelopment Teory and Practise. Second edition, Sage Publication, Inc.USA.
- Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, Edisi 1 Cetakan kelima. BPEE Jogjakarta
- BPS Kabupaten Kutai Barat. 2008. Kutai Barat Dalam Angka, Kutai Barat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat.
- Djojohadikusumo Sumitro, 1993, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Dombush, Rudiger. 2006. Makroekonomi. Edisi keempat. Penerbit erlangga. Jakarta
- Ghozali, Imam, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, BadanPenerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar : Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta.
- Halim. Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi.UPP AMP YKPN. Jakarta.
- Hera, Susanti. 2000. Keuangan Daerah di Indonesia. LPFE UI. Jakarta.
- Hirschman, Albert O terjemahan Sitohang, Paul Drs 1992. Strategi Pembangunan Ekonomi, PT. Dia Rakjat, Yayasan Dana Buku Indonesia, Jakarta
- Irawan dan Suparmoko.1992.Ekonomi Pembangunan. BPFE. Yogakarta.
- Jhingan, M. L. 1999. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Raja Grafindo. Jakarta. Kubo, Y dan Lee, YS. 1996. A Model of Endogenous Growth With A Trade-off Between Investment in Physical dan Human capital, Asian Economic Journal, 9 (22).
- Lee, Robert D, Jr. & Ronald W.Johnson. 1998. Public Budgeting Systems. Sixth edition, Gaithersburg. Maryland: AspenPublishers. Inc.
- Lutfi, 2006, Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, Jurnal Volume XIV, Nomor 1
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 2008. Ekonomi Publik Edisi ketiga. BPFE. Yogyakarta. Mankiw, Gregory.N. 2007. Makro Ekonomi, edisi keenam. Jakarta: Erlangga, Jakarta
- Mankiw, N. Gregory., Quah, Euston., dan Wilson, Peter. (2012). Pengantar Ekonomi Makro: Principles of Economics An Asian Edition (Volume 2) (Alih Bahasa: Biro Bahasa Alkemis). Jakarta: Salemba Empat.
- Mundle, S (1998). Financing Human Development: Some Lessons from Advanced Asian Countries. World Development 26 (4):659-672.
- Ranis, Gustav and Stewart, Frances, 2002, Economic Growth and Human Developmentin Latin America, Cepal No 78 The UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
- Riduwan, dan Sunarto, 2012. Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosila, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis. Alfabeta. Bandung.
- Romer, P.1989. Endogenous Technological Change . Working Paper No. 3210. NBERWorking paper Series. National Bureau of Economic Research (NBER). December 1989. Dimuat juga dalam Journal of Political Economy, 98, S71–S102. 1990.
- Samuelson, Paul A dan William D.Nordhaus. 1996. Makro Ekonomi (terjemahan). Edisi keempatbelas, Erlangga, Jakarta.

- Sameulson, Paul A dan Wiliam, D Nordhaus. 2004. Makro Ekonomi. Edisi Kempat belas. Jakarta. Erlangga. Jakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2006 Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Sidik, Machfud, 2002, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002.
- Simanjuntak, Payaman. 1985. Pengantar Ilmu Ekonomi Sumber Daya Manusia. LPFE UI. Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman. 2002. Undang-Undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kantor Perburuhan Internasional: Jakarta. Subandi. 2011. Ekonomi Pembangunan. Alfabeta. Bandung
- Sukirno, Sadono, 1994, Pengantar Teori Mikroekonomi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000 Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik
- Hingga Keynesian Baru Raja. Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Hingga Keynesian Baru Raja ,2006, Makroekonomi Modern, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Hingga Keynesian Baru Raja, 2007, Ekonomi Pembangunan, Kencana Pers, Jakarta.
- Hingga Keynesian Baru Raja. 2011 .Ekonomi Pembangunan:Proses, masalah dan Dasar Kebijakan". Edisi ketiga, Jakarta: Kencana Persada Media Group, Jakarta,.
- Hingga Keynesian Baru Raja. 2012. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. ANDI. Jakarta.
- Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Penerbit Salemba Empat Edisi Pertama.
- Todaro, MP, 1997. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 1, Terjemahan Haris Munandar, Jakarta: Erlangga.
- Todaro, MP, 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga jilid 1, Edisi Kedelapan. Jakarta, Erlangga
- Todaro, MP.2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga. Jakarta
- Todaro, MP. 2006. Pembangunan Ekonomi/ Edisi Kesembilan, Jilid 1 (Alih Bahasa:
- Haris Munandar dan Puji A.L.). Erlangga . Jakarta. UNDP. 1996. Human Developmen Report New York. UNDP.